

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini, objek penelitian yang dipilih penulis adalah divisi Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No.6, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun pemilihan di divisi ini sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa di bidang GTK ini, Sistem informasi yang berjalan masih dengan cara manual.

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdiri bersamaan dengan munculnya Era Otonomi daerah sebagai respon terhadap proses reformasi yang terjadi pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu berubah dari sistem pemerintahan yang sentral ke pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 11 bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, namun berdasarkan pasal 9 ayat 2, kewajiban tersebut tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.

Oleh karena itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 60, 61, dan 62 maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk perangkat daerah yang disebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bidang pendidikan. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas pendidikan yang diangkat oleh Gubernur Jawa Barat. Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pendidikan adalah pilar penting dalam pembangunan sebuah daerah, karena salah satu parameter untuk mengukur kemajuan sebuah negara adalah pendidikan, dengan pendidikan di harapkan akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berperadaban, di sini peran pemerintah sangat signifikan untuk merubah wajah pendidikan. Mengingat sangat pentingnya peranan pendidikan maka pemerintah mendirikan instansi Dinas Pendidikan di setiap daerah yang pengelolaannya dibawah kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Sebelum di berlakukannya otonomi daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, secara administrasi masih bersifat vertikal dengan nama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan sesuai tuntutan reformasi maka berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, menuntut adanya beberapa perubahan baru dan penyesuaian serta pengelolaan daerah otonom, salah satunya dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom serta peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No 15 Tahun 2000 Tanggal 12 Desember 2000 tentang daerah Dinas Provinsi Jawa Barat kemudian di sesuaikan kembali dengan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas dan unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Dinas Provinsi Jawa Barat merupakan penggabungan dari kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Jawa Barat yang berkantor di jalan Dr. Radjiman No 06 Bandung dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Barat yang berkantor di Jalan Banda No. 28 Bandung. Sesuai dengan kesepakatan maka Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Di Tetapkan Di Jalan Dr.Radjiman No.06 Bandung.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (DISDIK JABAR) adalah sebuah instansi yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa barat (PEMPROV) serta dibawah oleh Kementrian Pendidikan Nasional. DISDIK JABAR bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pendidikan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang berhubungan dengan Dunia Pendidikan di wilayah Provinsi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jabar

Adapun visi dan misi perusahaan/instansi adalah sebagai tujuan yang ingin dicapai instansi dalam meningkatkan instansi, yang dilakukan melalui aktivitas kerja yang harus diwujudkan oleh seluruh SDM yang ada didalamnya. Visi dan Misi juga menentukan arah kerja sebuah perusahaan/instansi untuk mencapai tujuannya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mempunyai arah tujuan, yaitu :

A. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

“Akserasi Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas dan Berakhlak Mulia Serta Menguasai Ilmu Pengetahuan, Berdaya Saing Menuju Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri, Dinamis Dan Sejahtera”.

Penjelasan tentang arti atau makna dari kata kunci visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **AKSELERASI**, adalah suatu upaya untuk dapat mencapai kondisi tertentu secara lebih cepat.
- **PEMBANGUNAN**, asal katanya adalah “MEMBANGUN” yang mengandung arti “membentuk, mendirikan, atau mewujudkan”. Dengan demikian, PEMBANGUNAN dalam hal ini diartikan sebagai “aktivitas untuk membentuk, mendirikan dan mewujudkan sesuatu ke arah yang lebih baik”.
- **SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**, adalah sebagai suatu konsep yang dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk yang paling mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- **CERDAS**, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi potensi manusia yang mampu mendayagunakan atau mensinergikan kemampuan/kecerdasan emosional, akademis/intelektual, dan spritual menjadi kekuatan yang positif yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan kesulitan, persoalan, dan masalah yang dihadapi.
- **BERAKHLAK MULIA**, yaitu suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi memiliki kepribadian sesuai tuntunan agama, norma dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, BERAKHLAK MULIA berarti SDM Jawa Barat dalam perilakunya berlandaskan kepada tuntunan agama, norma-norma yang berlaku disekitarnya dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
- **MENGUASAI IPTEK**, adalah suatu istilah yang mengandung arti memahami dan mampu menjalankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, MENGUASAI IPTEK diartikan sebagai suatu kondisi SDM Jawa Barat memiliki

pemahaman tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam kehidupannya.

- **BERDAYA SAING**, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk memenangkan sebuah kompetisi/perlombaan. Dengan demikian, BERDAYA SAING berarti SDM Jawa Barat memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan/lapangan kerja.
- **MENUJU**, yaitu kata sambung yang menunjukkan keterkaitan antara konsep “Akselerator Pembangunan” dengan tujuan akhir dari keunggulan yang ingin diwujudkan. **TERWUJUDNYA**, adalah satu kata yang mengandung arti “dapat di” wujudkannya, dapat direalisasikannya, dan dapat diimplementasikan menjadi sesuatu. **MASYARAKAT JAWA BARAT**, yaitu seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Provinsi Jawa Barat.
- **MANDIRI**, adalah suatu konsep yang diartikan sebagai suatu kondisi memiliki kemampuan atau kekuatan untuk berdiri sendiri atau tidak tergantung pada orang atau pihak lain. Dengan demikian, MANDIRI disini diartikan SDM Jawa Barat memiliki suatu kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain.
- **SEJAHTERA**, adalah suatu konsep yang mengandung arti suatu kondisi aman, sentosa dan makmur, selamat terbebas dari segala macam gangguan, kesukaran dsb. Dengan demikian, SEJAHTERA disini diartikan bahwa SDM Jawa Barat memperoleh dan merasakan kemakmuran serta terlepas dari segala macam

kesukaran hidup.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat didefenisikan secara operasional tentang Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai berikut : “Bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah/satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat yang memiliki kemampuan untuk menjadi akselerator (pemercepat) dalam membentuk atau mewujudkan penduduk Jawa Barat menjadi manusia yang : (1) memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual; (2) berperilaku sesuai tuntunan agama, norma-norma yang berlaku di masyarakat dan mematuhi peraturan perundang-undangan; (3) memiliki pemahaman sekaligus dapat memanfaatkan IPTEK; (4) memiliki kemampuan untuk memenangi persaingan dari suatu kompetisi atau perlombaan; (5) memiliki kemampuan/kekuatan untuk berdiri sendiri dan tidak menjadi beban bagi orang atau pihak lain; dan (6) memiliki kemampuan untuk bergaul dan beradaptasi dalam percaturan dunia global yang serba cepat, sehingga terwujud masyarakat Jawa Barat yang makmur dan terlepas dari segala kesukaran hidup.

B. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Misi adalah sesuatu tugas yang diemban dan ingin diwujudkan oleh instansi sebagai penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh aparatur dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal eksistensi serta peranan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menetapkan misi, yaitu :

1. Optimalisasi Kapasitas Sumber Daya Kelembagaan Dinas Pendidikan Mewujudkan Tata Kelola Yang Prima, Akuntabel Guna Tercapainya Good Governance Bidang Pendidikan.
2. Meningkatkan Upaya-upaya Pemerataan Dan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Serta Relevansi Pendidikan Secara Efisien Dan Efektif.

3.1.3 Moto Dinas Pendidikan Jawa Barat

Dikarenakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu instansi yang berada dibawah naungan Provinsi Jawa Barat, maka moto Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sama seperti halnya moto Jawa Barat yaitu, Gemah Ripah Repeh Rapih, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

- *Gemah-ripah* : subur makmur, cukup sandang dan pangan.
- *Repeh-rapih* : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai. (Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat).

3.1.4 Logo Dinas Pendidikan Jawa Barat

Instansi/perusahaan memiliki logo agar memiliki arti dan keunikan, logo mempresentasikan tujuan dan cita-citanya sebuah instansi/perusahaan, juga sebagai pembeda dan menjadi salah satu karakter atau ciri dari perusahaan/instansi tersebut. Berikut adalah logo dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



Gambar 3.1 Logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Sumber: Arsip, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Agustus 2018

3.1.5 Arti Lambang

Lambang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Makna bentuk dan motif yang terdapat dalam lambang ini ialah :

1. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai sebagai penjagaan diri.
2. Ditengah-tengah terlihat ada sebilah kujang. Kujang ini adalah senjata suku bangsa Sunda yang merupakan penduduk asli Jawa Barat. Lima lubang pada kujang melambangkan dasar negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila.
3. Padi satu tangkai yang terdapat di sisi sebelah kiri melambangkan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan kesuburan pangan, dan jumlah padi 17 menggambarkan tanggal Proklamasi Republik Indonesia.
4. Kapas satu tangkai yang berada di sebelah kanan melambangkan kesuburan sandang, dan 8 kuntum bunga menggambarkan bulan proklamasi Republik Indonesia.
5. Gunung yang terdapat di bawah padi dan kapas melambangkan bahwa daerah Jawa Barat terdiri atas daerah pegunungan.
6. Sungai dan terusan yang terdapat di bawah gunung sebelah kiri melambangkan di Jawa Barat banyak terdapat sungai dan saluran air yang sangat berguna untuk pertanian.
7. Petak-petak yang terdapat di bawah gunung sebelah kanan melambangkan banyaknya pesawahan dan perkebunan. Masyarakat Jawa Barat umumnya hidup mengandalkan kesuburan tanahnya yang diolah menjadi lahan pertanian.

3.1.5.1 Sejarah Divisi GTK

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dibentuk pada akhir tahun 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 36 Tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Pasal 214 Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 menyebutkan bahwa struktur organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, yakni salah satu direktorat jenderal yang dibentuk sesuai dengan peraturan tersebut, terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar, dan Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, seperti dijelaskan dalam Pasal 296 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, terdiri atas 4 subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, Subdirektorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Layanan Khusus; 1 subbagian yakni subbagian Tata Usaha; serta kelompok jabatan fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dijelaskan dalam Pasal 294 dan 295 Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010, yang diperbaharui oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

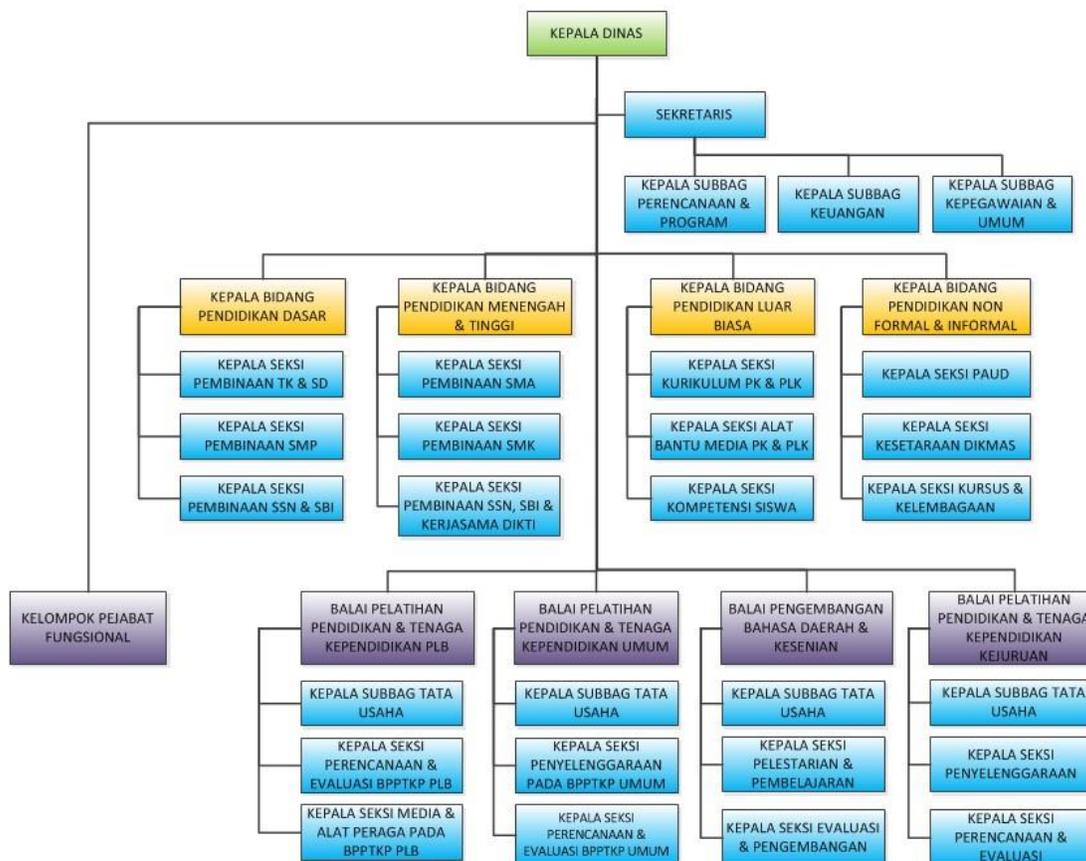
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang menaungi Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar merupakan Direktorat Jenderal yang dikelola bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dengan nama

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Mandikdasmen). Ditjen Mandikdasmen dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005.

Pemisahan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah ini dilakukan agar Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” dan 5 misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian Jaminan layanan pendidikan dapat dicapai.

3.1.6 Struktur Instansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi mempunyai arti penting karena struktur organisasi merupakan bentuk atau pola formal kegiatan dan hubungan antara berbagai bagian- bagian didalam suatu instansi . Dengan mengetahui struktur organisasi dapat diperoleh gambaran tentang bagian-bagian yang ada didalamnya, apa peran masing- masing bagian tersebut dan wewenang serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat :



Gambar 3.2 Struktur Instansi Dinas pendidikan Jawa Barat

Sumber: Website Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris, Jabatan Fungsional, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Dikmenti, Kepala Bidang PLB, Kepala Bidang PNFI. Kemudian Sekretaris membawahi Kepala Subbag Perencanaan & Program, Kepala Subbag Keuangan dan Kepala Subbag Kepegawaian & Umum. Sub Bagian Kepegawaian Umum mempunyai sub dibawahnya yaitu

Persuratan/Kearsipan, Kepegawaian, Poliklinik, Koperasi, Kendaraan, Humas & Hukum, yang masing-masing sub bagian tersebut memiliki koordinator tersendiri didalamnya.

3.1.7 Deskripsi Tugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Dinas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang urusan pendidikan. Adapun tugas-tugas dari setiap bagian atau jabatan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program, penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan program.
- d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas.
- e. Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- f. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan dasar.
- g. Seksi Pembinaan TK dan SD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan TK dan SD.

- h. Seksi Pembinaan SMP mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMP.
- i. Seksi Pembinaan SSN dan SBI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN dan SBI.
- j. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan menengah dan tinggi.
- k. Seksi Pembinaan SMA mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMA.
- l. Seksi Pembinaan SMK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SMK.
- m. Seksi Pembinaan SSN, SBI dan Kerjasama DIKTI mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pembinaan SSN/SKM, SBI dan kerjasama DIKTI.
- n. Bidang Pendidikan Luar Biasa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan luar biasa.
- o. Seksi Kurikulum PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kurikulum PK dan PLK.
- p. Seksi Alat Bantu Media PK dan PLK mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi alat bantu media PK dan PLK.
- q. Seksi Bina Promosi Kompetensi Siswa mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi bina promosi kompetensi siswa.

- r. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan non formal dan informal.
- s. Seksi PAUD mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan anak usia dini.
- t. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi pendidikan kesetaraan dan pendidikan masyarakat.
- u. Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok menyusun bahan kebijakan operasional dan fasilitasi kursus dan kelembagaan.

3.2 Sarana

Sarana dan Prasarana merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh sebuah instansi dalam menunjang pekerjaan pegawai instansi dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain :

3.2.1 Sarana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang berkantor pusat di Jalan Dr. Radjiman No. 6, Bandung memiliki beberapa Gedung serta halaman yang luas dan Lapangan Tennis Outdoor sebagai sarana olahraga. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki 3 gedung yang terdiri dari 5 lantai. Gedung pertama adalah gedung utama yang digunakan oleh beberapa bagian / divisi seperti ruangan Kepala Dinas dan Protokoler, ruangan Subbag Kepegawaian dan Umum, ruangan Humas dan Hukum, ruangan Subbag Perencanaan dan Program, Subbag Keuangan, serta ruangan Seni Budaya Daerah yang tepat berada di awal pintu masuk utama.

3.3 Lokasi dan Waktu PKL

3.3.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Lokasi Praktek Kerja Lapangan yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tepatnya beralamat di Jalan Dr. Radjiman No. 6 Bandung.

Telp : (022) 4264813

Fax : (022) 4624881

Web : www.disdik.jabarprov.go.id

3.3.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan selama 3 minggu yang mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 1 September 2018. Setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai Pukul 7.30 WIB sampai dengan 4.00 WIB.

3.4 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, teknik yang sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.4.1 Desain Penelitian

Metode Desain Penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam perancangan penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif sebagai jenis

dari penelitian. Metode kualitatif merujuk pada cara-cara mempelajari berbagai aspek kualitatif kehidupan sosial yang mencakup ragam dimensi sosial dari tindakan dan keadaan hingga proses, dan peristiwa sebagaimana dimengerti dan berdasarkan konstruksi dan makna yang diorganisasikan oleh dan melalui praktik- praktik sosial. Metode Kualitatif digunakan karena dalam pengukuran sebuah rancangan sistem informasi tidak dapat dihitung dengan angka-angka, dapat diukur dari kualitas yang diberikan dan dibentuk oleh sistem.

3.4.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu kegiatan selalu diperlukan suatu cara/metode dengan maksud agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penyusunan Laporan ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisis data.

3.4.2.1 Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber data atau langsung dari objek yang diteliti :

A. Observasi

Observasi yaitu cara untuk mendapatkan data dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di lapangan, dengan melihat atau mengamati secara langsung pada instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Observasi yang penulis lakukan pada Divisi Guru atau Tenaga Kerjaan.

B. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan / *interview* secara langsung kepada bagian yang terkait tentang pengisian data kepala sekolah di dinas pendidikan yang akan mengikuti Diklat , di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai kajian dalam perancangan sistem informasi Pengelolaan Data Form Kepala Sekolah , kemudian akan diajukan sebagai sistem yang baru

3.4.2.2 Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, dengan kata lain peninjauan teori-teori dari buku-buku literature, laporan, dokumen, majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga mendapatkan data-data dari internet.

3.4.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem

Metode pendekatan adalah suatu cara yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam sebuah sistem, dimana cara penyelesaiannya itu menggunakan metode pendekatan sistem dan metode pengembangan sistem.

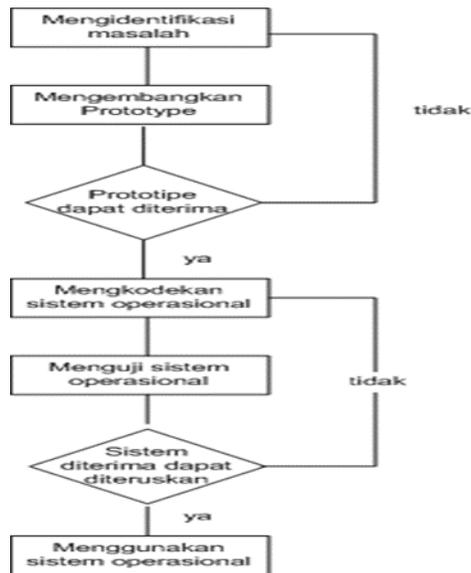
3.4.3.1 Metode Pendekatan Sistem

Metode pendekatan sistem yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan terstruktur. Dimana terdapat beberapa alasan penulis menggunakan pendekatan terstruktur diantaranya adalah mudah dipahami dan mudah digunakan artinya metode ini mudah dimengerti, selain itu metode terstruktur telah banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi.

3.4.3.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penulisan laporan kerja praktik ini adalah metode prototyping, yaitu suatu proses yang digunakan untuk membuat

model dari Sistem Informasi pengelolaan Data Form Kepala Sekolah secara bertahap. Berikut ini gambar metode *prototype* :



Gambar 3.3 Model *Prototype*

(sumber : Raymond McLeod jr. *Sistem Informasi Manajemen*, PT Prenhallindo, Jakarta)

Menurut (Raymond: 2001) tahapan – tahapan yang harus dilaksanakan pada model prototype adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Kebutuhan Pemakai

Pada tahap ini dilakukan studi kelayakan dan studi terhadap kebutuhan pemakai, baik yang meliputi model *interface*, teknik prosedural maupun teknologi yang akan digunakan.

2. Mengembangkan Prototype (Quick Desain)

Pada tahap kedua, dilakukan pengembangan *prototype* sistem, yakni pembuatan desain global untuk membentuk *software* contoh. Kemudian pemodelan sistem tersebut

diperlihatkan kepada user.

3. Menentukan Penerimaan *Prototype*

Tahap ketiga, mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana pemodelan sistem yang dibuat dapat diterima atau tidak, perbaikan-perbaikan apa yang diinginkan oleh pemesan atau bahkan harus merombak secara keseluruhan

4. Mengadakan Sistem Operasional melalui Pemrograman Sistem

Tahap keempat yaitu tahap pembuatan program aplikasi berdasarkan pemodelan yang telah disepakati.

5. Menguji Sistem Operasional

Pada tahap ini akan dilakukan uji coba sistem yang telah disusun baik menggunakan data sekunder maupun data primer untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berlangsung dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan.

6. Menentukan Sistem Operasional

Tahap ini adalah tahap penentuan, apakah sistem operasional yang sudah dibangun dapat diterima atau harus dilakukan beberapa perbaikan, atau bahkan harus dibongkar semuanya dan mulai dari awal lagi.

7. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui.

3.4.3.3 Alat Bantu Analisis Perancangan

Metode pendekatan sistem data merupakan suatu cara dimana menggambarkan aliran data yang terjadi dalam suatu sistem informasi, dengan menggunakan pendekatan sistem data akan lebih mudah membaca alur data yang diproses

1. *Flow Map / Bagan Alir*

Flowmap merupakan bagan yang menggambarkan dan menjelaskan urutan prosedur-prosedur arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem dan menggambarkan aliran data atau dokumen dari satu entitas ke entitas lain.

2. *Diagram Kontek*

Diagram kontek adalah suatu diagram sederhana yang menghubungkan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem. Diagram kontek dipresentasikan dengan lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem.

3. *Data Flow Diagram*

DFD merupakan salah satu komponen dalam serangkaian pembuatan perancangan sebuah sistem komputerisasi. DFD menggambarkan aliran data dari sumber pemberi data (*input*) ke penerima data (*output*).

a. Terminator

Terminator dapat disebut juga “kesatuan Luar”, yaitu suatu unit kerja, jabatan, atau sejenisnya yang berada diluar sistem tetapi memberi andil atas pemberian atau penerimaan data dari sistem secara langsung. Terminator dapat pula disebut dengan Sumber Data (*Input*), maupun Tujuan Pemberian Data (*Output*).

Pemberi data dan penerima data yang dimaksud adalah pihak yang sangat dekat dan memiliki hubungan langsung dengan sistem. Adapun pihak luar yang berhubungan dengan pihak luar lainnya tidak boleh digambarkan. Misalkan, dalam

pengisian Registrasi pendaftaran ulang, taruna berhubungan dengan sistem. Orang tua berhubungan dengan taruna, tetapi tidak berhubungan dengan sistem, karenanya kesatuan luar “orang tua”, tidak boleh digambarkan.

b. Proses

Proses adalah suatu tindakan yang akan diambil terhadap data yang masuk. Karena proses adalah tindakan, maka proses berisi kata kerja, proses diberikan identifikasi (nomor) agar mempermudah sekuen untuk diagram detilnya.

c. Alur Data

Alur data menggambarkan data yang mengalir dari terminator ke proses atau dari proses lainnya. Data yang dibawa oleh alur data harus disebutkan dan diletakkan diatas lambang alur data dan bila alur data digambar panjang, sebaiknya penulisan data mendekati lambang anak panahnya.

d. Penyimpanan Data (*Data Stroge*)

Data yang akan disimpan perlu ditempatkan ke satu tempat penyimpanan data. Data yang disimpan dapat berupa data manual maupun digital. Untuk data digital, penyimpan data tersebut kelak akan dijadikan file data dikomputer. Alur data yang anak panahnya menuju penyimpanan data, kegiatannya adalah menulis, merekam data, sehingga isi file data akan berubah karenanya. Sedangkan alur data yang anak panahnya menuju keproses dari penyimpanan data, kegiatannya adalah membaca data, sehingga isi file data tidak akan berubah karenanya.

4. Kamus Data

Kamus data (Data Dictionary) merupakan kumpulan data yang memberikan informasi mengenai diskripsi formal dari elemen-elemen yang ada pada Data Flow Diagram. Informasi tersebut mencakup definisi, struktur serta pemakai data.

Pada tahap perancangan sistem, kamus data digunakan untuk merancang input, laporan-laporan dan database. Kamus data adalah daftar database dan tabel (bagian dari *database*) yang digunakan dalam aplikasi ini.

5. Perancangan Basis Data

Perancangan basis data adalah mendapatkan skema basis data yang meminimasi terjadinya *redudansi* dan *duplikasi* data serta menjaga *integritas* data. Kebanyakan metode perancangan yang ada berbasis pada model basis data relasional, struktur data diatur melalui pembuatan table-table dan keterkaitan antar tabel satu dengan yang lainnya (relasi). Dalam perancangan basis data penulis menggunakan teknik normalisasi, relasi tabel dan ERD (Entity Relationship Diagram).

1) Normalisasi

Normalisasi adalah suatu proses dimana elemen-elemen data dikelompokkan menjadi tabel-tabel, dimana dalam tabel tersebut terdapat entity-entity dan relasi antar entity tersebut. Dalam proses normalisasi field kunci memegang peranan yang penting dalam pembuatan table yang berisi entity dan relasinya. Tahapan- tahapan normalisasi adalah :

a. Bentuk tidak normal (*Unnormalized Form*)

Bentuk tidak normal adalah suatu bentuk dimana semua data dikumpulkan apa adanya tanpa mengikuti aturan-aturan tertentu. Bisa jadi data yang dikumpulkan akan tidak lengkap dan terjadi duplikasi data.

b. Bentuk Normal I (*First Normal Form / 1-NF*)

Suatu relasi memenuhi 1-NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record.

c. Bentuk Normal II (*Second Normal Form / 2-NF*).

Suatu relasi memenuhi 2-NF jika dan hanya jika :

- Berada pada bentuk 1-NF.
- Semua atribut yang bukan kunci memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya terhadap kunci primer.

d. Bentuk Normal III (*Third Normal Form / 3-NF*).

Suatu relasi memenuhi bentuk III (3-NF) jika dan hanya jika :

- Relasi tersebut memenuhi 2-NF.
- Semua atribut bukan primer tidak punya hubungan transitif. Dengan kata lain, setiap atribut yang bukan kunci haruslah bergantung pada *primary key* dan pada *primary key* secara keseluruhan.

2. Tabel Relasi

Relasi merupakan asosiasi yang menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Tabel relasi digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data. Operasi ini digunakan,

misalnya untuk melakukan seleksi isi baris pada tabel kemudian dikombinasikan dengan tabel lain untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

3. ERD (*Entity Relationship Diagram*)

Menurut [Han07] ERD (*Entity Relationship Diagram*) yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing- masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang merepresentasikan seluruh fakta.

Dalam ERD (*Entity Relationship Diagram*) terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu entity, atribut dan kardinalitas

a. Entitas/*Entity*

Entiti adalah orang, tempat, kejadian atau konsep yang informasinya direkam atau suatu objek yang dapat diidentifikasi secara unik.

b. Atribut

Atribut adalah suatu informasi yang akan disimpan dari suatu entitas. Setiap entity mempunyai attribute atau sebutan untuk mewakili suatu entitas. Attribute juga disebut juga sebagai data *element*, data *field*, data *item*.

c. Kardinalitas

Kardinalitas adalah model data yang harus dapat mempresentasikan jumlah peristiwa dari objek didalam hubungan yang diberikan.